

Kolaborasi *multi-stakeholder* pada praktik *corporate social responsibility* dalam penanganan sampah di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon

Yorri Harlyandra¹, Kafa Abdallah Kafa^{*2}

¹*Community Development Officer* di Cirebon Power, Indonesia

²Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: yorri.harlyandra@cirebonpower.co.id¹; *abdallah_kafa@ugm.ac.id²

Naskah diterima: 10/06/2021; Revisi: 14/06/2021; Disetujui: 16/06/2021

Abstrak

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang produksi pemanfaatan sumber daya alam, PT. Cirebon Electric Power (CEP) telah melaksanakan berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR), salah satunya ialah kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan, Kabupaten Cirebon melalui kelompok Penggerak Wisata Pengarengan (PESPA). Program ini menjadi penting untuk dilihat dikarenakan memiliki keunikan tersendiri, yakni keberadaan *multi-stakeholder* di sana yang ikut berperan aktif dan berkolaborasi dalam mengupayakan keberhasilan kegiatan tersebut, mengingat persoalan sampah di sana cukup meresahkan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang dipadukan dengan teori implementasi CSR dan kerja sama *multi-stakeholder*. Data penelitian diperoleh melalui tiga tahap, yakni observasi, wawancara, dan *focus group discussion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *multi-stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan penanganan sampah ini antara lain: PT. CEP sebagai inisiator, *enabler*, *mentor*, dan *controller*; kelompok Formas PL sebagai *implementer* dan *controller*; Pemerintah Desa Pengarengan sebagai *regulator* dan *controller*; kelompok PESPA sebagai *implementer*; tokoh masyarakat sebagai *enabler* dan *controller*, dan; DLH Kabupaten Cirebon sebagai *regulator* dan sekaligus *implementer*. Namun demikian, kegiatan ini juga memiliki tantangannya tersendiri, yakni mengupayakan adanya konsistensi para *stakeholder* yang terlibat dan perlunya inovasi-inovasi pengembangan, seperti pemanfaatan sampah plastik menjadi berbagai macam kerajinan atau sampah organik menjadi pupuk kompos.

Kata kunci: *CSR; kollaborasi multi-stakeholder; penanganan sampah*

Multi-Stakeholder collaboration on corporate social responsibility practices in handling waste in Pengarengan Village Cirebon Regency

Abstract

As one of the companies that engaged in the production of natural resources, PT. Cirebon Electric Power (CEP) has carried out various Corporate Social Responsibility (CSR) programs, one of which is waste management activities in Pengarengan Village, Cirebon. This program is important because it has its own uniqueness, namely the existence of multi-stakeholders who



play an active role and collaborated, considering the waste problem there is quite troubling to the community. This study uses a qualitative-descriptive method combined with the theory of CSR implementation and multi-stakeholder cooperation. The research data was obtained through three stages, namely observation, interviews, and focus group discussions. The results of the study indicate that the multi-stakeholder roles involved in this waste management activity include: PT. CEP as initiator, enabler, mentor, and controller; Formas PL as implementer and controller; Pengarengan Village Government as regulator and controller; PESPA as implementer; community leaders as enablers and controllers, and; DLH Cirebon Regency as a regulator and at the same time implementer. However, this activity also has its own challenges, namely seeking consistency of the stakeholders involved and the need for development innovations, such as the use of plastic waste into various kinds of crafts or organic waste into compost.

Keywords: CSR; multi-stakeholder collaboration; waste management.

Pendahuluan

Diskusi tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), baik secara teoretis maupun praksis telah dan sedang berkembang sedemikian pesatnya di Indonesia. CSR sebagai sebuah teori dan praktik tentunya juga mengalami banyak dinamika mulai dari perdebatan antara wacana dan teori CSR itu sendiri (Susetiawan et al., 2012), idealisme CSR dengan realitas yang ada di lapangan (Susetiawan, 2012), dan pemaknaan ulang CSR melalui alternatif konsep yang ditawarkan (Yuda, 2016). Meskipun demikian, kita juga tidak dapat memungkiri bilamana pada kondisi faktualnya terdapat praktik CSR yang seringkali digunakan semata-mata untuk membangun dan/atau mengembangkan *image* perusahaan yang baik dimata masyarakat (Kemp, 2001; Suharto, 2008). Namun juga tidak bermaksud untuk mendiskreditkan peran CSR yang demikian, pada faktanya tidak sedikit pula praktik CSR yang telah banyak membantu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar wilayah perusahaan.

Adapun CSR sendiri merujuk pada suatu bentuk upaya dan komitmen berkelanjutan dari entitas bisnis untuk ikut andil dan berkontribusi dalam agenda pembangunan sosial-ekonomi yang lebih bermakna, baik bagi entitas dunia usaha sendiri, pemerintah, masyarakat, maupun lingkungan dimana ia beroperasi. Melalui CSR, entitas bisnis berkomitmen yang tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan sebesar-besarnya saja, melainkan pula untuk membangun kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan kawasan secara *holistik*, melembaga, dan berkelanjutan (Suharto, 2008). Menurut Wibisono (2007), praktik CSR setidaknya memiliki empat manfaat yang didapatkan, antara lain: *Pertama*, bagi perusahaan, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, serta mendapatkan *image* atau citra yang positif dari berbagai *stakeholder* lainnya; perusahaan lebih mudah dalam memperoleh akses terhadap modal; perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, dan; perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko. *Kedua*, bagi pemerintah atau negara, praktik CSR yang baik tentu akan mencegah *Corporate Misconduct* atau malpraktik bisnis, seperti penyuapan pada aparaturnegara atau aparaturnegak hukum yang memicu adanya praktik korupsi. *Ketiga*, bagi masyarakat, keberadaan perusahaan di suatu daerah akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas kondisi sosial-ekonomi masyarakat di daerah tersebut, dan; *Keempat*, bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi secara berlebihan

atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan, dan sebagai upaya menuju terciptanya keseimbangan alam secara berkeberlanjutan.

Pada pelaksanaannya, praktik CSR tentu akan menjadi lebih baik apabila keseluruhan prosesnya melibatkan para *stakeholder* yang ada. Dengan pelibatan para *stakeholder* yang ada tersebut tentunya dapat terbentuk suatu kolaborasi untuk saling mendukung program masing-masing demi tercapainya pembangunan sosial dan keberdayaan di masyarakat (Kafaa, 2019). Adapun pengertian *stakeholder* sendiri mengacu pada individu, kelompok, dan/atau lembaga yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh entitas organisasi tertentu sebagai dampak dari aktifitas-aktifitasnya (Freeman, 2010). Dalam konteks pembahasan ini, tanggung jawab perusahaan tidak hanya ditujukan kepada pemiliknya atau pemegang saham saja, melainkan juga terhadap pihak-pihak (*stakeholder*) yang terkait dan/atau yang terkena dampak dari adanya aktifitas perusahaan, yang dalam hal ini adalah praktik CSR perusahaan.

Oleh sebab itu, penting kiranya bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dan melibatkan *stakeholder* yang ada dalam praktik CSR nya. Pelibatan ini yang kemudian disebut dengan kerja sama *multi-stakeholder* dalam praktik CSR. Kerja sama yang dimaksud dapat berupa kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok, dan/atau lembaga bersepakat untuk bekerja sama guna memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, secara bersama menanggung segala risiko maupun memperoleh keuntungan, dan melakukan peninjauan terkait proses pelaksanaan kerja sama itu sendiri secara berkala (Tennyson, 1994).

Pada konteks ini, kerja sama tersebut ditujukan tidak lain untuk saling berkolaborasi satu sama lain dalam upayanya guna mencapai apa yang telah menjadi tujuan dari adanya praktik CSR tersebut. Terlebih lagi, pencapaian tujuan praktik CSR tersebut pun pada gilirannya akan menyentuh pada hakikat praktik CSR itu sendiri, yakni pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara lebih bermakna dan berkelanjutan. Kerja sama *multi-stakeholder* dalam praktik CSR yang dibangun juga haruslah berpedoman pada pola kerja sama yang suportif dan produktif. Sehingga dengan pola yang demikian, proses kerja sama pun lebih menempatkan *multi-stakeholder* sebagai subjek dan terlaksananya proses secara *symbiosis-mutualisme*. Dengan kata lain, perusahaan memiliki kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, dan masyarakat dapat memberikan dukungan positif kepada perusahaan dan juga ikut berpartisipasi aktif dalam praktik CSR yang dijalankan.

Sejalan dengan itu, di Indonesia, nomenklatur peraturan yang membahas terkait praktik CSR juga tidak hanya berbicara pada persoalan sosial saja, melainkan juga persoalan lingkungan yang ada. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Adapun yang dimaksud sebagai TJSL (istilah yang sama dengan CSR) ialah komitmen perusahaan untuk andil dalam pembangunan ekonomi secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, baik bagi diri perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat secara luas. Lebih lanjut lagi, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah telah mewajibkan bagi setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia untuk menjalankan praktik CSR terutama bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi hasil sumber daya alam. Selain itu, pada tataran global, terdapat pula ISO 26000 sebagai sebuah panduan dari pelaksanaan CSR

yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi praktik program CSR dari suatu perusahaan (International Organization for Standardization, 2010). Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, tentu keduanya ditujukan agar tercipta keberlanjutan dan pembaharuan yang lebih bermakna -setidaknya perbaikan- dari kondisi alam yang dieksplorasi sehingga keseimbangan sosial dan alam pun diharapkan dapat terjaga dengan baik.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang produksi pemanfaatan sumber daya alam (dalam hal ini ialah batu bara), PT. Cirebon Electric Power (CEP) juga telah melaksanakan berbagai program CSR, baik ditujukan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah perusahaan, maupun dalam cakupan yang lebih luas lagi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui studi ini, peneliti telah melakukan penelitian terkait salah satu program CSR yang dilaksanakan oleh PT. CEP di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Program CSR tersebut bernama Program Pengembangan Ekowisata Pengarengan melalui Kelompok Penggerak Wisata Pengarengan (PESPA). Pemilihan program tersebut sebagai fokus tulisan ini dikarenakan memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan program yang lainnya. Keunikan tersebut dapat dilihat dari bagaimana *multi-stakeholder* yang ada di sana ikut berperan dan berkolaborasi dalam mengupayakan keberhasilan program yang diawali dengan praktik penanganan sampah di wilayah Desa Pengarengan, Kabupaten Cirebon. Terlebih lagi, penanganan sampah ini juga tidak hanya ditujukan untuk keberhasilan program CSR semata, melainkan juga menunjang keberhasilan program dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon dan komunitas masyarakat setempat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan terbebas dari timbunan sampah yang meresahkan.

Sehingga melalui tulisan ini, penulis berupaya untuk mendeskripsikan terkait bagaimana implementasi dan peran dari PT. CEP, DLH Kabupaten Cirebon, dan komunitas masyarakat setempat dalam praktik penanganan sampah di Desa Pengarengan sebagai titik awal dari pengembangan ekowisata di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi, kendala, dan tantangan ke depannya dari kolaborasi *multi-stakeholder* tersebut dalam kegiatan penanganan sampah untuk kemudian dapat mengembangkan ekowisata di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon. Sehingga harapannya, tulisan ini dapat memberikan pandangan pengetahuan kepada program CSR ini sehingga bisa sedapat mungkin semakin mengoptimalkan kolaborasi *multi-stakeholder* dalam penanganan sampah yang telah selama ini terjalin dengan baik. Lebih jauh lagi, dengan adanya penelitian ini juga diharapkan bahwa nantinya hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan kajian dan literatur terutama mengenai pemberdayaan masyarakat, kerja sama *multi-stakeholder*, dan praktik CSR yang ada di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengacu pada pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki ciri-ciri seperti berakar pada latar alamiah sebagai suatu keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, dan memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data (Moleong, 2007).

Pendekatan kualitatif-deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek maupun obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hair et al., 2007). Metode kualitatif-deskriptif juga menuntut keberadaan peneliti untuk melakukan deskripsi atas sebuah fenomena atau pengalaman yang telah dipilih. Pun melakukan proses transformasi atas fenomena dan pengalaman pada aspek yang diteliti.

Penggunaan metode kualitatif-deskriptif juga mempermudah peneliti di dalam memberikan rangkuman yang komprehensif terkait fenomena dan pengalaman yang diteliti. Hal demikian mengharuskan peneliti untuk cukup dekat dengan data yang dihasilkan dari objek penelitian (Sandelowski, 2000). Terlebih lagi, penelitian yang bersifat deskriptif juga memiliki ciri-ciri, antara lain: (1) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual; (2) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, serta diiringi dengan interpretasi rasional yang adekuat (Nawawi, 2005). Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif-deskriptif ini digunakan sebagai penggambaran secara deskriptif terkait implementasi program CSR yang melibatkan peran dari *multi-stakeholder* yang ada di dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan sebagai titik awal dalam pengembangan ekowisata di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon.

Adapun data yang telah diperoleh pada penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder yang keduanya didasarkan pada dua tahapan penelitian, yakni: 1) penelitian secara langsung yang mencakup observasi, wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD), dan; 2) penelitian tidak langsung dalam bentuk studi pustaka. *Pertama*, pada tahap observasi, peneliti mengamati implementasi praktik penanganan sampah di lapangan berikut juga dengan menentukan informan untuk kemudian dilanjutkan pada tahap wawancara mendalam dan FGD. Observasi ini telah dilaksanakan secara langsung di lapangan pada tanggal 12-14 Maret 2021. *Kedua*, pada tahap wawancara mendalam, peneliti telah mewawancarai informan yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu yang berdasar pada hasil observasi lapangan. *Ketiga*, FGD dilakukan dengan pelaksanaan diskusi bersama dengan seluruh pihak kunci dari *multi-stakeholder* yang ada dengan bermaksud untuk mendalami hal-hal apa saja yang masih perlu dibahas dalam kaitannya dengan *improvement* program. Sedangkan studi pustaka telah peneliti lakukan selama proses rangkaian penelitian berlangsung untuk mengetahui konsep, teori, serta data-data penunjang lainnya. Adapun literatur yang digunakan dalam studi pustaka ini berupa buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen (seperti laporan kegiatan, notulensi, dan lain-lain), dan *website* tertentu untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian.

Selanjutnya untuk penentuan informan pada penelitian ini didasarkan pada teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2012: 218). Berdasar pada teknik penentuan informan tersebut, kemudian peneliti telah berhasil menentukan 17 orang informan yang terdiri dari: pihak pelaksana CSR dari PT. CEP yang mencakup bidang pemberdayaan masyarakat dan lingkungan; kelompok Penggerak Wisata Pengarengan (PESPA); kelompok Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (Formas PL); Pemerintah Desa Pengarengan; Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengarengan; petugas kebersihan di Desa Pengarengan; tokoh masyarakat di Desa Pengarengan, dan; Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon. Informan-informan tersebut telah peneliti wawancarai pada tanggal 14-18 Maret 2021 dan pada saat yang bersamaan juga dilakukan kegiatan FGD pada tanggal 17 Maret 2021. Perlu ditekankan juga di sini bahwa mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih mengkhawatirkan, maka seluruh proses pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan juga tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai upaya untuk mengedepankan terjaganya kesehatan dan keselamatan bagi setiap orang yang terlibat dalam penelitian ini.

Adapun data-data yang telah didapatkan kemudian telah dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012). Teknik reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Kemudian teknik penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan dan wawancara mendalam), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Terakhir, teknik penarikan kesimpulan ialah data hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil suatu tindakan dalam penelitian. Perlu diketahui juga bahwa seluruh teknik analisis data ini telah dilakukan pada saat proses penelitian lapangan, meskipun semua data belum terkumpul secara lengkap.

Terakhir, data penelitian yang telah didapatkan kemudian telah diuji lagi dengan teknik triangulasi yang berdasar pada sumber, metode, dan peneliti sendiri (non-triangulasi). Triangulasi sumber mengacu pada kesesuaian jawaban-jawaban dari para informan, triangulasi metode mengacu pada kesesuaian jawaban informan dengan dokumentasi dan dokumen pendukung, dan non-triangulasi mengacu pada keyakinan peneliti atas data yang diperoleh di lapangan. Hal tersebut bertujuan agar data yang ditampilkan pada hasil penelitian benar-benar objektif sesuai dengan temuan di lapangan melalui proses triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Awal Penanganan Sampah sebagai Titik Awal Pengembangan Ekowisata

Perlu disampaikan bahwa Desa Pengarengan berada di wilayah pesisir pantai Kabupaten Cirebon sehingga menjadi wajar bilamana terdapat inisiatif lokal yang berupaya untuk mengembangkan ekowisata yang berbasis lingkungan untuk wilayah pesisir pantainya. Tentu pengembangan ekowisata tersebut juga tidak serta merta dapat dikembangkan secara spontan, melainkan memerlukan tahap-tahap pelaksanaan untuk mewujudkannya. Salah satu tahapan yang ditempuh dalam rangka persiapannya adalah dengan kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan yang dikelola oleh kelompok pemuda setempat yang bernama PESPA.

Justifikasi kegiatan penangananan sampah ini sebagai tahap persiapan menuju pengembangan ekowisata dikarenakan pada awalnya ditemukan bahwa masih banyaknya tumpukan-tumpukan sampah yang berserakan di wilayah Desa Pengarengan. Pun keberadaan sungai yang menjadi jalur utama ke bibir pantai juga melintas di sepanjang wilayah Desa Pengarengan yang seringkali arus alirannya membawa sampah dari hulu yang kemudian mengendap di pinggiran sungai. Sehingga kedua kondisi

tersebut juga seringkali menyebabkan banjir karena adanya penyumbatan atau penyempitan jalur aliran sungai yang disebabkan oleh adanya sampah yang bertumpuk. Tidak hanya itu, sampah-sampah yang mengapung di aliran sungai juga sangat mengganggu bagi pertumbuhan ekosistem flora dan fauna di sekitaran pantai, seperti burung-burung dan pertumbuhan mangrove yang juga berfungsi sebagai penahan alamiah dari bencana banjir dan abrasi.

“Jadi memang dulu itu sebelum adanya FORMAS PL dan PESPA, di sini banyak banget sampah yang berserakan, belum lagi kiriman sampah dari hulu sungai. Jadi sering menyebabkan banjir di sini, juga mengganggu tanaman dan hewan-hewan yang ada di sekitaran sungai menuju bibir pantai. Nah karena kiriman sampah dari hulu sungai itu harus melibatkan banyak institusi, maka kita buat saja dulu kelompok masyarakat di sini untuk minimal bisa menangani sampah dari masyarakat, jadi selain bisa mendukung untuk pengembangan ekowisata tetapi juga bisa mewujudkan desa yang bersih”. (Hasil wawancara dengan pihak pelaksana CSR dari PT. CEP, 14 Maret 2021).

Adapun kegiatan penanganan sampah ini secara formal dilaksanakan sejak akhir tahun 2020 yang lalu yang juga bertepatan dengan dibentuknya kelompok PESPA oleh Pemerintah Desa Pengarengan, PT. CEP, Formal PL, dan masyarakat setempat. Tentunya kegiatan penanganan sampah ini juga tidak hanya ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan ekowisata saja, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih pula di wilayah Desa Pengarengan. Namun demikian, meskipun kegiatan ini dapat dibilang sangatlah baru, akan tetapi keberadaan PESPA sebagai kelompok pelaksana penanganan sampah ini sudah cukup memberikan perubahan yang salah satunya dapat terlihat dari sudah tidak ada lagi tumpukan sampah yang berserakan, terutama di sekitar sungai yang seringkali menyebabkan adanya banjir.

Peran Multi-Stakeholder dalam Penanganan Sampah

Bagian ini akan membahas terkait bentuk kolaborasi dan peranan dari setiap *multi-stakeholder* yang terlibat di dalam kegiatan penanganan sampah ini mulai dari tahap perencanaan hingga implementasinya. Adapun pihak-pihak yang dimaksud ialah PT. CEP, kelompok Formas PL, Pemerintah Desa Pengarengan, kelompok PESPA, tokoh masyarakat, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Pihak-pihak tersebut dalam praktiknya saling berkolaborasi satu sama lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kaitannya dengan keberlangsungan kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan.

Pertama, PT. CEP sebagai pihak swasta di sekitar wilayah Desa Pengarengan melalui program CSR nya dapat dikategorikan sebagai pihak inisiator, *enabler*, *mentor*, dan sekaligus *controller* dari kegiatan penanganan sampah ini. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana PT. CEP berupaya untuk memecahkan persoalan sampah di Desa Pengarengan dengan cara berkoordinasi dan bekerja sama dengan Formas PL yang merupakan kelompok masyarakat binaan CSR PT. CEP yang sebelumnya telah ada, Pemerintah Desa Pengarengan, dan beberapa tokoh masyarakat setempat lainnya.

“Awalnya kami merasa kalo persoalan sampah di sini (baca: wilayah Desa Pengarengan) perlu diatasi dulu, jadi kami berkoordinasi dengan Formas PL sebagai kelompok binaan kami yang fokus pada isu lingkungan di sini, lalu pemerintah desa, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya untuk membahas penanganan sampah yang ada di sini”. (Hasil wawancara dengan pihak dari PT. CEP, 14 Maret 2021).

Dalam praktiknya, PT. CEP memang telah memiliki usulan ide inisiasi terkait kegiatan penanganan sampah ini, namun ide tersebut juga tetap harus didiskusikan secara lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait yang dalam hal ini ialah kelompok Formas PL dan Pemerintah Desa Pengarengan. Setelah berdiskusi, kemudian PT. CEP, Formas PL, dan Pemerintah Desa Pengarengan bersepakat untuk membuat kelompok masyarakat yang mayoritas diisi oleh para pemuda yang memiliki peranan aktif di desa. Para pemuda yang dimaksud ini memang sebelumnya telah beberapa kali melakukan kegiatan pembersihan lingkungan di Desa Pengarengan, akan tetapi masih belum terorganisir dengan baik. Sehingga kemudian para pemuda tersebut dilibatkan untuk ikut serta dalam kegiatan penanganan sampah yang akan dilaksanakan yang selanjutnya dibentuklah kelompok PESPA.

Selain sebagai inisiator, PT. CEP juga berperan sebagai *enabler*, *mentor*, dan *controller*. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana PT. CEP memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan penanganan sampah tersebut kepada kelompok PESPA, seperti pengadaan alat-alat kebersihan, tempat atau bak penampungan sampah, dan lain sebagainya. PT. CEP juga berperan sebagai *mentor*, yakni melaksanakan pelatihan-pelatihan terkait kegiatan penanganan sampah dan pendampingan secara intensif kepada kelompok PESPA hingga saat ini. Dalam hal perannya sebagai *controller*, PT. CEP juga sampai saat ini masih mengawasi dan mendampingi kelompok PESPA dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani persoalan sampah di Desa Pengarengan. Namun demikian, peran *controller* ini juga tidak serta merta menutup ruang inisiasi dan ekspresi kelompok PESPA dalam pelaksanaannya. Sehingga kelompok PESPA tetap memiliki kebebasan untuk mengatur, mengelola, dan menginisiasi tindakan-tindakannya dalam penanganan sampah di sana guna semakin lebih efektif dan bermanfaat lagi.

Kedua, Formas PL sebagai kelompok masyarakat binaan CSR dari PT. CEP sebelumnya telah dibentuk memiliki peran sebagai *implementer* dan *mentor*. Selain dilibatkan ketika proses awal dari pembentukan kelompok PESPA, kelompok Formas PL juga melaksanakan kegiatan penanganan sampah terutama dalam hal pembersihan lingkungan di sekitaran sungai yang menuju bibir pantai. Kegiatan tersebut setiap hari dilakukan ketika para anggotanya pergi ke laut untuk mencari ikan maupun ketika pulang, mengingat mayoritas anggota dari kelompok Formas PL ini adalah nelayan. Hal demikian juga disaksikan secara langsung oleh peneliti ketika peneliti melakukan penelitian lapangan di sana. Dalam hal perannya sebagai *mentor*, hingga saat ini juga kelompok Formas PL masih mendampingi kelompok PESPA secara intensif bersama dengan PT. CEP, seperti berdiskusi dan memberikan arahan kepada kelompok PESPA terkait kondisi terkini dalam kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan.

Ketiga, Pemerintah Desa Pengarengan berperan sebagai *regulator* dan *controller* dari pelaksanaan kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Pemerintah Desa Pengarengan berhasil membentuk kelompok PESPA secara formal yang bekerja sama dengan PT. CEP dan kelompok Formas PL. Tidak hanya itu, dalam praktiknya juga Pemerintah Desa Pengarengan berkontribusi dalam membentuk regulasi terkait pentingnya menjaga lingkungan yang salah satunya dengan langkah persuasif kepada masyarakat agar selalu membuang sampah kepada tempatnya. Pun Pemerintah Desa Pengarengan bersama dengan pihak lainnya juga berhasil melakukan kerja sama dengan DLH Kabupaten Cirebon dalam hal pengangkutan sampah dari tempat atau bak sampah akhir yang telah dikumpulkan oleh kelompok PESPA. Sehingga kelompok PESPA tidak mengalami kesulitan di dalam membuang sampah yang telah terkumpul ke bak atau tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Kabupaten Cirebon. Selain itu, Pemerintah Desa Pengarengan juga sangatlah suportif pada kegiatan ini seperti dalam hal menyediakan sarana pengangkutan sampah dan melakukan perannya sebagai *controller* dan fungsi pengawasannya sehingga kegiatan penanganan sampah ini dapat terus berjalan secara baik.

Keempat, kelompok PESPA tentunya berperan sebagai pengelola dan pelaksana atau *implementer* dari kegiatan penanganan sampah ini. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana kelompok PESPA melaksanakan serangkaian kegiatan tersebut mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga *monitoring* dan evaluasi. Dalam hal pengelolaan, kelompok PESPA melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti PT. CEP, Formas PL, Pemerintah Desa Pengarengan, dan DLH Kabupaten Cirebon dalam kaitannya dengan penanganan sampah di Desa Pengarengan. Adapun untuk tahapan persiapan juga biasanya kelompok PESPA mengidentifikasi terlebih dahulu sarana pengangkutan sampah yang dibutuhkan dan mencari tahu titik-titik mana sajakah yang biasanya terdapat tumpukan sampah sehingga kemudian dapat diangkut oleh anggotanya yang bertugas sebagai petugas kebersihan. Dalam hal pelaksanaan, tentunya kelompok PESPA ini bertindak sebagai pelaksana kebersihan yang kemudian diangkut ke tempat atau bak sampah akhir yang telah disediakan. Selain itu, kelompok PESPA juga selalu melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi di setiap harinya/minggu/bulannya/tahunnya untuk mengetahui hambatan dan kendala, baik itu selama proses pengangkutan sampah maupun kegiatan lainnya diluar pengangkutan sampah, misalnya dengan memperindah lingkungan sekitar dengan kreatifitas-kreatifitas tertentu.

Kelima, tokoh masyarakat di sini berperan sebagai *enabler* dan *controller* dalam kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan. Hal ini terlihat dari peran salah satu tokoh masyarakat, yakni Bapak Naim Suwanda yang memberikan hak guna dari sebagian tanah miliknya untuk digunakan sebagai kantor kesekretariatan kelompok PESPA dan tempat atau bak sampah akhir yang dikumpulkan oleh kelompok PESPA. Pun tidak hanya memberikan hak guna tanahnya, Bapak Naim Suwanda juga membangun kantor kesekretariatan tersebut dengan biayanya secara pribadi. Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya juga selalu memberikan saran atau masukan

kepada kelompok PESPA terkait pelaksanaan penanganan sampah di Desa Pengarengan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa para tokoh masyarakat tersebut sangatlah suportif dan kooperatif, baik dalam peranannya sebagai *enabler* maupun *controller*.

Keenam, DLH Kabupaten Cirebon berperan sebagai *regulator* dan *implementer* dalam kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan. Dalam peranannya sebagai *regulator*, DLH Cirebon yang juga bersama dengan Pemerintah Desa Pengarengan telah membuat regulasi dalam bentuk nota kerja sama dalam hal pengangkutan sampah dari bak sampah di Desa Pengarengan untuk dikumpulkan di tempah pembuangan akhir sampah yang ada di Kabupaten Cirebon. Dalam praktiknya, kegiatan pengangkutan sampah ini dilakukan ketika kelompok PESPA menginformasikan bahwa sampah yang ada di bak sudah penuh dan perlu diangkut. Sehingga petugas pengangkutan sampah dari DLH Kabupaten Cirebon juga tidak lama akan mendatangnya untuk melakukan pengangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran dari DLH Kabupaten Cirebon ini tidak hanya sebagai *regulator* di level kebijakan saja tetapi juga sebagai pelaksana (*implementer*) yang pada konteks ini ialah dalam hal pengangkutan sampah.

Adapun untuk mempermudah pembaca di dalam memahami bagaimana peran dari para aktor tersebut dalam kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan ini, maka dapat dilihat dari ringkasan yang tertera pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Peran *Multi-Stakeholder* dalam Penanganan Sampah di Desa Pengarengan

No.	Aktor	Peran	Keterangan
1.	PT. CEP	Inisiator, <i>enabler</i> , <i>mentor</i> , dan <i>controller</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Menginisiasi kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan. • Membentuk kelompok PESPA sebagai pelaksana kegiatan. • Melakukan pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada kelompok PESPA. • Memberikan bantuan pengadaan sarana kegiatan, seperti bak sampah, alat-alat kebersihan, dan lain sebagainya. • Melakukan pengawasan atas kegiatan tersebut.
2.	Kelompok Formas PL	<i>Implementer</i> dan <i>controller</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlibat dalam pembentukan kelompok PESPA sebagai pelaksana kegiatan. • Melaksanakan kegiatan pembersihan sampah terutama yang ada di sungai. • Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap kelompok PESPA kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan.
3.	Pemerintah Desa Pengarengan	<i>Regulator</i> dan <i>controller</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk kelompok PESPA sebagai pelaksana kegiatan. • Membuat regulasi tentang kebersihan lingkungan. • Membuat nota kerja sama dengan DLH Kabupaten Cirebon terkait pengangkutan sampah. • Melakukan pengawasan terhadap kelompok PESPA kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan.
4.	Kelompok PESPA	<i>Implementer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam kaitannya dengan kegiatan penanganan

No.	Aktor	Peran	Keterangan
			sampah di Desa Pengarengan. <ul style="list-style-type: none"> • Mengelola seluruh kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan. • Melaksanakan seluruh kegiatan penanganan sampah, mulai dari pengangkutan sampah hingga membuat lingkungan sekitar menjadi bersih dan indah. • Melakukan monitoring dan evaluasi mulai dari kegiatan harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan.
5.	Tokoh masyarakat	<i>Enabler dan controller</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu dalam pengadaan prasarana untuk kantor kesekretariatan kelompok PESPA dan tempat atau bak sampah akhir. • Mengawasi dan memberikan saran atau masukan kepada kelompok PESPA terkait aktifitas penanganan sampahnya.
6.	DLH Kabupaten Cirebon	<i>Regulator dan implementer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat nota kerja sama dengan Pemerintah Desa Pengarengan terkait pengangkutan sampah. • Melaksanakan kegiatan pengangkutan sampah dari bak sampah yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh kelompok PESPA.

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2021.

Tantangan Keberlanjutan Penanganan Sampah

Kegiatan penanganan sampah memang bukanlah suatu hal yang mudah untuk dapat berhasil di dalam mencapai tujuannya. Hal ini dikarenakan penanganan sampah juga sangat ditentukan oleh perilaku masyarakat atas pentingnya menjaga lingkungan terutama dalam hal membuang sampah ke tempatnya. Sebagaimana teori perubahan perilaku masyarakat itu sendiri, bahwa salah dua aspek yang sangat penting di dalam mengubah perilaku masyarakat adalah pengetahuan dan kerja sama (Giovanni, 2012). Sederhananya, masyarakat dapat benar-benar bisa untuk berubah jika mereka memiliki pengetahuan atas sesuatu yang patut mereka ubah. Namun seiring dengan itu, kerja sama setiap aktor pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mengupayakan adanya perubahan perilaku di masyarakat tersebut juga harus terus digiatkan secara simultan. Sehingga dalam konteks penanganan sampah di Desa Pengarengan ini, idealnya penyelenggara kegiatan secara terus menerus memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan terutama dalam menyikapi persoalan sampah ini. Demikian pula bagi para *stakeholder* yang ada juga harus bekerja sama dan saling melakukan tugas dan fungsinya masing-masing mulai dari tahap persiapan (misalnya pemberian wawasan dan pembentukan pengelola), perencanaan, pelaksanaan, hingga *monitoring* dan evaluasi dalam kaitannya dengan penanganan sampah tersebut.

Menariknya, kedua aspek tersebut sedari awal hingga saat ini selalu menjadi *concern* dari pelaksanaan kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan oleh para penyelenggara, sehingga harapannya dalam waktu dekat ini dapat mencapai perubahan perilaku masyarakat di dalam menyikapi persoalan sampah tersebut. Terlebih lagi, sekarang ini masyarakat juga telah mulai ada perubahan ke arah sana yang hal tersebut terlihat dari bagaimana masyarakat sudah beberapa kali melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti untuk bersih-bersih desa. Namun demikian, kondisi kerja sama

atau kolaborasi dari para *stakeholder* yang hingga kini terlaksana dengan baik juga memiliki tantangannya tersendiri, salah satunya ialah menjaga konsistensi dari tugas, fungsi, dan perannya masing-masing. Sehingga ke depannya, hubungan kolaboratif yang baik tersebut harus terus dipelihara dengan baik dan selalu memiliki visi yang sama dalam mewujudkan lingkungan di Desa Pengarengan yang sehat dan bersih.

Selain itu, kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan juga masih perlu dikembangkan lagi dengan inovasi-inovasi kegiatan yang lebih kreatif dan tentunya juga efektif-efisien. Adapun salah satu bentuk inovasinya dapat dalam bentuk pemanfaatan sampah plastik menjadi berbagai macam bentuk kerajinan atau sampah organik menjadi pupuk kompos. Inovasi-inovasi tersebut kiranya menjadi penting, mengingat selama ini sampah yang telah dikumpulkan masih baru hanya dibuang begitu saja ke tempat pembuangan akhir di wilayah Kabupaten Cirebon, padahal sebetulnya sampah-sampah tersebut juga dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomis.

Namun demikian, jika inovasi-inovasi tersebut benar-benar akan dilaksanakan, maka perlu juga diiringi dengan kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan kepada para anggota kelompok PESPA terkait teknik-teknik pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi produk-produk bernilai ekonomis secara baik dan benar. Pun keberadaan prasarana bak atau tempat sampah yang lebih luas lagi dan sarana yang mendukung bagi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah juga perlu disediakan demi terwujudnya inovasi tersebut. Dengan demikian, tantangan-tantangan tersebut ke depannya harus dapat dipersiapkan sejak sekarang, mengingat persoalan sampah di Desa Pengarengan ini cukup *urgent*.

Pada sisi yang lain, keberadaan potensi dan peluang SDM serta modal sosial di sana juga sangatlah baik dan mendukung, sehingga dapat dijadikan sebagai basis yang kuat bagi terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah untuk menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomis. Tidak hanya itu, kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan juga dapat berkembang ke arah program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan (*community empowerment based on economic environment*), yang tentunya masih dalam kaitannya dengan program pengembangan ekowisata. Sehingga program tersebut tidak hanya mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga memberikan kontribusi keuntungan ekonomi, baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut maupun masyarakat secara lebih luas lagi. Adapun berikut ini bagan atau skema yang kira-kira dapat menggambarkan bagaimana pengembangan kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan ini menjadi sebuah program pemberdayaan masyarakat yang menjadikan lingkungan yang bersih dan sehat serta juga menghasilkan nilai ekonomis (lihat gambar 1).



Gambar 1. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi dan Lingkungan di Desa Pengarengan
Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2021.

Kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan ini merupakan titik awal menuju pengembangan ekowisata di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon. Adapun justifikasinya ialah dikarenakan di wilayah Desa Pengarengan pada awalnya ditemukan masih banyaknya tumpukan-tumpukan sampah yang berserakan. Pun keberadaan sungai yang menjadi jalur utama ke bibir pantai juga melintas di sepanjang wilayah Desa Pengarengan yang seringkali arus alirannya membawa sampah dari hulu yang kemudian mengendap di pinggir sungai. Sehingga kedua kondisi tersebut juga seringkali menyebabkan banjir karena adanya penyumbatan atau penyempitan jalur aliran sungai yang disebabkan oleh adanya sampah yang bertumpuk. Tidak hanya itu, sampah-sampah yang mengapung di aliran sungai juga sangat mengganggu bagi pertumbuhan ekosistem flora dan fauna di sekitaran pantai, seperti burung-burung dan pertumbuhan mangrove yang juga berfungsi sebagai penahan alami dari bencana banjir dan abrasi.

Lebih lanjut lagi, kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan ini memang dapat dikatakan masih baru, mengingat pelaksanaannya baru dimulai 1 tahun yang lalu. Namun meskipun demikian, kegiatan ini juga menjadi penting untuk dipertimbangkan, terutama dari bagaimana para *stakeholder* yang ada di sana saling berkolaborasi sesuai tugas dan perannya masing-masing untuk mewujudkan lingkungan di Desa Pengarengan yang bersih dan sehat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya secara terperinci, bahwa peran *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan ini

antara lain: PT. CEP sebagai inisiator, *enabler*, *mentor*, dan *controller*; kelompok Formas PL sebagai *implementer* dan *controller*; Pemerintah Desa Pengarengan sebagai *regulator* dan *controller*; kelompok PESPA sebagai *implementer*; tokoh masyarakat sebagai *enabler* dan *controller*, dan; DLH Kabupaten Cirebon sebagai *regulator* dan sekaligus *implementer*.

Perlu ditekankan juga di sini bahwa peran-peran tersebut ditujukan untuk saling melengkapi dan bemanfaat satu sama lain demi keberhasilan kegiatan yang pada akhirnya dapat mencapai terwujudnya lingkungan di Desa Pengarengan yang bersih dan sehat. Dengan adanya kolaborasi dari para *stakeholder* tersebut, kiranya kegiatan ini memiliki modal yang kuat untuk mencapai tujuannya. Pun kini kegiatan penanganan sampah tersebut juga sudah mulai menghasilkan perubahan di masyarakat, seperti sudah tidak ditemukannya lagi tumpukan sampah yang berserakan, lingkungan yang indah dengan penanaman bunga dan hasil kreatifitas dari kelompok PESPA, dan terlaksananya kegiatan masyarakat untuk bergotong royong melalui kerja bakti bersih-bersih desa.

Simpulan

Pertama, diperlukan adanya konsistensi dari masing-masing pihak atau *stakeholder* yang terlibat di dalam kegiatan ini. Salah satu cara untuk mempertahankan konsistensi tersebut adalah dengan menjadikan kegiatan penanganan sampah ini sebagai wadah yang memberikan keuntungan bagi semua pihak. Keuntungan yang dimaksud di sini juga tidak melulu tentang ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Seperti misalnya, melalui kegiatan ini, PT. CEP diuntungkan oleh karena keberhasilannya dalam menjalankan program CSR yang dapat benar-benar memberdayakan masyarakat dan berdampak baik bagi lingkungan di sekitar perusahaan; Pemerintah Desa Pengarengan dan DLH Kabupaten Cirebon yang merasa diuntungkan oleh karena masyarakatnya produktif dan terwujudnya lingkungan yang terbebas dari sampah; serta kelompok PESPA, kelompok Formas PL, dan masyarakat umum yang diuntungkan oleh karena memiliki kegiatan yang produktif dan terwujudnya lingkungan di sekitar mereka yang bersih dan sehat. *Kedua*, kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan juga masih perlu dikembangkan lagi dengan inovasi-inovasi kegiatan yang lebih kreatif dan tentunya efektif- efisien. Salah satunya inovasinya dapat dalam bentuk pemanfaatan sampah plastik menjadi berbagai macam bentuk kerajinan atau sampah organik menjadi pupuk kompos. Inovasi-inovasi tersebut kiranya menjadi penting, mengingat selama ini sampah yang telah dikumpulkan masih baru hanya dibuang begitu saja ke tempat pembuangan akhir di Kabupaten Cirebon, padahal sebetulnya sampah-sampah tersebut juga dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomis. Namun demikian, jika inovasi-inovasi tersebut benar-benar akan dilaksanakan, maka perlu juga diiringi dengan kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan kepada para anggota kelompok PESPA terkait teknik-teknik pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi produk-produk bernilai ekonomis secara baik dan benar. Pun keberadaan prasarana bak atau tempat sampah yang lebih luas lagi dan sarana yang mendukung bagi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah juga perlu disediakan demi terwujudnya inovasi tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Melalui artikel ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PT. Cirebon Electric Power sebagai pemberi dana yang bekerja sama dengan Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
- Hair, F., Artur, M., Phip, S., & Mike, P. (2007). *Research method for business*. John Wiley & Sons Ltd.
- Kafaa, K. A. (2019). Social capital and multi-stakeholders cooperation as a foundation of corporate social responsibility. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 3(3), 365-381. <https://doi.org/https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i3.4158>
- Kemp, M. (2001). Corporate social responsibility in Indonesia: quixotic dream or confident expectation? <https://hdl.handle.net/1813/98967>
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. H. (2005). *Metode penelitian bidang sosial*.
- Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Research in nursing & health*, 23(4), 334-340. [https://doi.org/https://doi.org/10.1002/1098-240X\(200008\)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G](https://doi.org/https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G)
- Sugiyono, S. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R &D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2008). Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate, Presented Paper on Conference “CSR: Strategy. *Management and Leadership*”, Jakarta, 13-14
- Susetiawan, S. (2012). Implementasi CSR dalam arena civil society: Antara idealisme dan realitas. . In Susetiawan (Ed.), *Corporate social responsibility: Komitmen untuk pemberdayaan masyarakat* (pp. 3-30). Azzagrafika.
- Susetiawan, S., Suparjan, S., & Sandi, S. (2012). *Corporate social responsibility: Komitmen untuk pemberdayaan masyarakat*. Azzagrafika.
- Tennyson, A. (1994). *The Works of Alfred Lord Tennyson*. Wordsworth Editions.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Surabaya. Fascho Publishing Sumber Internet.
- Yuda, T. K. (2016). Memaknai ulang corporate social responsibility: Upaya mewujudkan fair responsibility. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 200-217.